

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kelangsungan pembangunan infrastruktur yang semakin gencar di Indonesia (Gunasti, 2018). Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan menguasai kompetensi kerja agar terciptanya pelaksanaan konstruksi yang aman dan berkualitas (Harahap & Syahrizal, 2017).

Kompetensi kerja adalah kemampuan tiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan (Utomo *et. al*, 2011). Kompetensi yang harus dimiliki setiap tenaga kerja tertuang dalam pembukuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), mengandung rumusan kemampuan kerja yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan dan syarat jabatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa tenaga kerja harus menguasai kompetensi sesuai dengan SKKNI. Penguasaan kompetensi ini akan mencerminkan bagaimana tenaga kerja memahami dan melaksanakan pekerjaannya dengan kesesuaian standar yang ada. Namun, kenyataannya masih banyak tenaga kerja yang “belum matang” karena kesadaran akan kompetensi kerjanya masih minim.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan di akhir tahun 2017 sebanyak 5,6 juta tenaga kerja konstruksi hanya berstatus pendidikan

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) saja, bahkan 8%-nya tidak atau belum tamat SD ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Menurut Rivelino (2017) rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran kompetensi menjadi titik kritis kualitas SDM konstruksi, khususnya adalah tenaga terampil yang akan berpengaruh langsung terhadap *attitude* dan produktivitas kerja.

Tenaga terampil adalah operator yang menangani langsung satu pekerjaan tertentu, seperti mandor, tukang, *drafter*, dan *surveyor* (Yuliana, 2011). Sementara lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pun dapat digolongkan menjadi tenaga terampil, sehingga tenaga terampil seperti tukang ataupun *drafter* yang dibutuhkan dalam dunia konstruksi seharusnya berasal dari tingkat pendidikan minimal SMK. Pada jenjang itu, pemahaman dan penanaman kompetensi memang diberlakukan dari sekolah kejuruannya tersebut (Rivelino, 2017).

Lulusan SMK dituntut untuk dapat terjun langsung menuju dunia kerja. Menurut Santiyadnya (2011) SMK adalah pendidikan kejuruan yang dirancang untuk mengembangkan *skill*, *attitude*, kebiasaan kerja, serta apresiasi yang dibutuhkan oleh pekerja untuk memasuki dunia kerja. Senada dengan itu, Santosa (2018) menuturkan bahwa dengan kompetensi yang diperoleh lulusan SMK harus adaptif terhadap perubahan dan difusi teknologi saat ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan tenaga terampil layaknya tukang harusnya memiliki kompetensi setara dengan apa yang diajarkan dalam kompetensi dasar bangunan di SMK. SDM yang terlanjur

menjadi tukang pun sudah sepatutnya mendapatkan jaminan kompetensi yang sesuai. Dalam mewujudkan hal itu perlulah dukungan dalam berbagai aspek, salah satunya adalah pedoman kompetensi seperti instrumen yang dapat menjadi acuan pengukuran kompetensi yang dibutuhkan tukang serta mencakup standar kompetensi yang ada dan juga perkembangan lapangan saat ini.

Instrumen adalah alat bantu dalam mengumpulkan data guna mengukur serta mengetahui ketercapaian kompetensi seseorang (Rahayu *et. al.*, 2009). Instrumen diperlukan untuk mengukur tingkat penguasaan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja dengan kesesuaian terhadap standar yang ada. Salah satu lembaga pemerintah dalam bidang konstruksi, yakni Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggunakan instrumen sebagai pedoman dan acuan mensertifikasi para tenaga kerja. PUPR memiliki instrumen yang dipublikasi dalam situs resmi Dirjen Bina Konstruksi atau *binakonstruksi.pu.go.id*. Salah satunya adalah instrumen pekerjaan plesteran–acian.

Untuk mengembangkan instrumen yang telah ada, maka diperlukan penelitian pendahuluan dalam memperoleh justifikasi ahli dan teori-teori pendukung lainnya terhadap instrumen tersebut. Pendahuluan ini dilakukan dalam menemukan apakah instrumen yang ada saat ini telah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan tukang dan juga sudah *update* dengan pelaksanaannya di lapangan saat ini.

Hasil dari penelitian pendahuluan dengan menggunakan 3 panel ahli dan menghasilkan *judgment* yaitu: dari ahli materi pertama –Tri Kabul S.

yang bekerja sebagai *supervisor finishing* bangunan di salah satu mega proyek saat ini— berpendapat mengenai beberapa *item* pekerjaan tidak relevan dengan kenyataan di lapangan, seperti tidak ada plesteran pada langit-langit gedung, langit-langit hanya di *finishing* dengan lapisan *skimcoat* atau *patching* saja; dan juga lantai tidak diplester, kini bahan sebagai finis lantai adalah screeding sebagai perataan dan peninggiannya. Sedangkan dari ahli materi satunya —Suparno sebagai guru materi dasar-dasar konstruksi di salah satu SMK Jakarta— menambahkan jika tidak hanya APD yang perlu diperhatikan, tetapi juga kebersihan lingkungan harus termasuk kedalam persiapan pekerjaan.

Berbeda dari kedua ahli sebelumnya, Andi M. Ishak sebagai ahli instrumen dengan kualifikasi dalam evaluasi pendidikan menyimpulkan bahwa keseluruhan instrumen masih dalam kriteria sesuai. Namun, saran yang diberikan bahwa *performance test* sebaiknya tidak menggunakan skala Guttman, gunakan *rating scale* untuk memberikan penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas, contohnya rubrik. (*Pendapat dari para ahli dapat dilihat dalam lampiran pendahuluan halaman 69*).

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa instrumen pekerjaan plesteran yang ada saat ini memiliki beberapa masalah, seperti prosedur pekerjaan yang tidak menjadi prioritas utama, beberapa *item* pekerjaan tidak relevan dengan lapangan, serta dalam mengukur aspek keterampilan tidak menggunakan *performance test*. Oleh karena itu, menarik kiranya dilakukan pengembangan instrumen keterampilan tukang plesteran dengan

memperhatikan prosedur dan pelaksanaan kerja yang diperbaiki dan penggunaan *performance test* dalam mengukur aspek keterampilan kerjanya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang tertera maka dapat teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah tukang sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasinya sebagai “tenaga terampil”?
2. Apakah instrumen yang digunakan pada pekerjaan plesteran telah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan saat ini?
3. Apakah instrumen yang digunakan pada pekerjaan plesteran telah menggunakan model penilaian yang tepat?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Kompetensi yang diperoleh perlu menyesuaikan kualifikasi tukang sebagai “tenaga terampil”
2. Instrumen yang akan dikembangkan untuk pekerjaan plesteran perlu menyesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan saat ini
3. Instrumen yang akan dikembangkan untuk pekerjaan plesteran menggunakan model penilaian rubrik.

## **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah tentang: “Bagaimana

mengembangkan instrumen keterampilan tukang plesteran sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan saat ini??"

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan instrumen keterampilan pekerjaan plesteran yang dapat digunakan sebagai pedoman kompetensi untuk tukang plesteran.

### **1.6 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1. Bagi Lembaga**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi lembaga dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi instrumen keterampilan tukang plesteran yang telah ada.

#### **2. Bagi Peneliti**

Manfaat bagi peneliti adalah menambah pengetahuan dan wawasan terkait kriteria kompetensi tukang plesteran yang dibutuhkan di dunia kerja, sesuai dengan SKKNI dan relevansi di lapangan.

